GUNTINGAN BERITA LINGKUNGAN

Surat Kabar	**: Suara Pembaruan**	**Tanggal**	**:**	**23 januari 2007**
Subyek	**: Rehabilitasi hutan**	**Hari**	**:**	**Selasa**
		Halaman	**;**	**7**

2 Juta Hektare Lahan Akan Direhabilitasi

[JAKARTA] Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GNRHL) 2007 akan diperluas menjadi dua juta hektare dari rencana awal yang hanya 900.000 hektare. Hal itu dilakukan untuk mempercepat penanggulangan bencana seperti banjir, tanah longsor, dan kekeringan panjang.

Demikian disampaikan Menteri Koordinator bidang Kesra Aburizal Bakrie seusai memimpin rapat koordinasi tingkat menteri tentang GNRHL di Jakarta, Senin (22/1). Rapat tersebut juga dihadiri Menteri Kehutanan MS Kaban dan Menteri Negara Lingkungan Hidup Rachmat Witoelar.

Aburizal menjelaskan, peningkatan luas lahan ini akan berimplikasi pada kenaikan anggaran. Bila sebelumnya untuk rehabilitasi hutan dan lahan seluas 900.000 hektare membutuhkan biaya Rp 4,2 triliun, maka rehabilitasi dua juta hektare akan memerlukan dana mencapai dua kali lipat.

"Tentu saja ada peningkatan dana karena ada perluasan target sasaran lahan yang harus direhabilitasi. Dari Rp 4,2 triliun akan meningkat menjadi Rp 8 triliun. Dana itu dialokasikan dari dana reboisasi maupun dari APBN murni," katanya.

Dikatakan, untuk mempercepat pencapaian hasil GNRHL, maka akan dibuat payung hukum berupa Keputusan Presiden (Keppres). Hal itu bercermin dari pengalaman sepanjang tahun 2003-2006 yang tidak sesuai target. Dari 9,6 juta hektare yang rencananya direhabilitasi, yang berhasil hanya tiga juta hektare.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Kehutanan MS Kaban menyatakan, GNRHL akan diprioritaskan di provinsi-provinsi yang kondisi lahannya sangat kritis. Penentuan provinsi ini akan dibicarakan bersama gubernur.

Ia menjelaskan, beberapa provinsi yang masuk dalam kategori kritis adalah Pulau Jawa, Madura, Sumatera, dan Kalimantan.

"Selain melakukan GNRHL, pemerintah juga akan terus melakukan operasi *illegal logging* (pembalakan liar). Operasi yang selama ini dijalankan terbukti mampu menurunkan perambahan hutan walaupun pemberian sanksi terhadap para *illegal logger* masih belum membawa efek jera," katanya.

Perpustakaan Emil Salim
Kementerian Negara Lingkungan Hidup

Menneg LH Rachmat Witoelar mengatakan, penegakan hukum yang lebih tegas diharapkan akan dapat berjalan pada tahun 2007.

"Untuk dapat tercapainya penegakan hukum yang lebih tegas, maka kami tidak hanya akan bekerja sama dengan Kapolri dan Kejaksaan Agung, tetapi juga Mahkamah Agung. Dalam waktu setengah hingga satu tahun ini tindakan tegas itu sudah akan kelihatan. Daerah yang diprioritaskan untuk penegakan hukum secara tegas adalah Papua. Kami memperkirakan bahwa pembalakan liar di Papua sudah membawa kerugian pada negara hampir sebesar Rp 2,5 triliun," paparnya. [A-22]

Perpustakaan Emil Salim
Kementerian Negara Lingkungan Hidup